

Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pilkada Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Fresty Dinia, Al Rafni, Suryanef, Nurman S
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Al Rafni**
E-mail: alrafni@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya Pandemi Covid-19 membuat segala regulasi pelaksanaan pilkada harus berdasarkan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih. KPU Provinsi Sumatera Barat memformulasikan strategi agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan dengan baik sehingga terciptanya pilkada yang demokratis. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada tahun 2020 di masa Pandemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data terhadap hasil wawancara tersebut hingga didapatkan data yang paling absah. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat adalah: pertama, mengaktifkan sosialisasi pilkada di masa pandemi, kedua, mengoptimalkan kampanye di media masa, ketiga, memastikan seluruh tahapan sudah berdasarkan aspek kesehatan, dan keempat, mengoptimalkan penggunaan aplikasi si rekap dalam penginputan suara. selanjutnya Kendala dan Upaya yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Strategi politik, KPUD Sumatera Barat, Virus Covid-19

ABSTRACT

The emergence of the Covid-19 pandemic has made all regulations for the implementation of local elections based on the safety of both organizers and elections. The KPU of West Sumatra Province has formulated a strategy so that the implementation of the regional elections will continue to run well so as to create a democratic election. The purpose of this study is to describe and identify the strategy of the KPU of West Sumatra Province in carrying out the 2020 elections during the Pandemic. The research method used in this research is descriptive qualitative by conducting interviews and documentation studies. Furthermore, data reduction was carried out on the results of the interview to obtain the most valid data. The results showed that the strategies adopted by the KPU of West Sumatra Province were: first, making the socialization of the regional elections effective during the pandemic, second, optimizing campaigns in the social media, third, ensuring all stages were based on health aspects, and fourth, optimizing the use of applications for inputting votes. Furthermore, the Constraints and Efforts faced by the KPU West Sumatra Province in carrying out the Regional Head election during the Pandemic.

Keywords: political strategy, KPUD of West Sumatra, Covid-19



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tujuan memajukan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa dikenal dengan *welfare state* pada saat ini sedang mengalami goncangan. Sejak masuknya virus Covid-19 ke Indonesia semua menggemparkan aspek kehidupan tidak hanya di bidang kesehatan saja tetapi, ikut mengganggu tatanan dan jalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Realistisnya dapat dilihat yaitu terganggu dan terhambatnya agenda pemilihan kepala Daerah yang sempat di undur dikarenakan virus Covid-19 ini agar tidak menimbulkan penyebaran. Virus Covid-19 berhasil mengubah pola kehidupan serta perilaku masyarakat yang bisa dikatakan terbatas.

Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota pada masa darurat Covid-19. Pelaksanaan pilkada pada awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 setelah dijadwalkan ulang maka pelaksanaannya menjadi tanggal 09 Desember 2020. Tidak hanya Indonesia saja yang akan menjalankan pemilihan kepala Daerah tetapi, ada 55 Negara di Dunia yang akan melaksanakan pemilihan umum yang bersifat Nasional ataupun lokal di Negeranya. Menurut Antonio Spinelli dalam International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) menurut data yang terdapat dalam artikel ini, Korea Selatan yang tetap memilih melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan sebelumnya. Korea Selatan melaksanakan pemilihan pada tanggal 15 April 2020 dimana virus Covid-19 sedang tinggi di dunia. Korea Selatan berhasil mengatur pemilihan umumnya untuk meminimalisir resiko penyebaran virus.

Strategi yang dilakukan Korea Selatan dalam melaksanakan pemilu seharusnya menjadi tolak ukur oleh Indonesia agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar. Banyaknya timbul permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia seperti ancaman tentang keselamatan pemilih dan penyelenggara pada saat pilkada dilaksanakan. Masyarakat masih bersifat apatis dalam menerima suatu peraturan yang baru. Pemerintah harus memiliki strategi yang kuat dalam menyadarkan masyarakat bahwa Pemilihan Kepala Daerah sangat penting dilakukan walaupun sedang di dalam masa pandemi sekali pun. Kepala Daerah merupakan nahkoda dalam menentukan arah kemana daerah tersebut akan berlayar. Apalagi pada masa pandemi ini peran Kepala Daerah sangat dibutuhkan dikarenakan dengan adanya Kepala Daerah yang memegang kendali disuatu daerah tersebut diharapkan bisa menuntaskan segala permasalahan yang terjadi pada saat pandemi seperti sekarang ini.

Pada saat pandemi, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah harus berdasarkan protokol kesehatan. KPU RI sebagai pemberi regulasi telah menjelaskan segala tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dikarenakan pilkada harus memperhatikan aspek keselamatan

dan aspek kesehatan baik dari pemilih, dan petugas dilapangan harus terjamin aman. Pada saat pandemi protokol kesehatan salah satu hal yang menjadi ketakutan di tengah masyarakat, masyarakat masih memiliki kecemasan jika pilkada tetap dilaksanakan pada saat pandemi. Masyarakat takut jika pilkada tetap dilaksanakan maka akan membuat cluster penyebaran virus Covid-19. Hal ini merupakan salah satu tugas KPU dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan selama pilkada berlangsung.

KPU Provinsi Sumatera Barat mencatat angka partisipasi 61,68% pada pilkada di tahun 2020. Angka partisipasi ini belum bisa mencapai target rata-rata nasional yaitu 77,5%. Salah satu yang menjadi hambatan dalam meningkatkan angka partisipasi yaitu banyaknya daerah *blackspot* di Sumatera Barat yang sulit dijangkau hal ini berakibat kepada terhambatnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pilkada baik informasi secara *online* maupun secara langsung. Lalu, masih tingginya sifat apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, dan masyarakat masih memiliki tingkat keraguan apakah KPU mampu dalam menjalankan pilkada ini dengan aman tanpa adanya kesalahan di lapangan.

Beberapa contoh partisipasi yaitu di suatu TPS yang memiliki 355 DPT tetapi, yang hanya memilih datang ke TPS yaitu 120 orang. Walaupun tingkat partisipasi nasional belum tercapai, KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan berhasil meyakinkan, memberi edukasi kepada masyarakat dalam

pemilihan kepala daerah dimasa pandemi ini. Dimana pada pilkada tahun 2020 KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil menaikkan angka partisipasi daerah dibandingkan pada pilkada tahun 2015 lalu.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditelusuri diantaranya oleh Mokhammad Samsul Arif pada tahun 2020 yang berjudul "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19". Fokus penelitian ini adalah upaya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilihan kepala daerah pada masa pandemi dan menyiapkan berbagai strategi agar angka partisipasi dalam pemilihan tidak menurun. Hasil penelitian ini untuk mewujudkan pilkada yang maksimal ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi dan mengoptimalkan komunikasi agar angka partisipasi tidak menurun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I'ib Sutera Aru Persada dan Fifiana Wisneni pada tahun 2020 yang berjudul "Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi dan Digitalisasi KPU". Fokus penelitian ini adalah meningkatkan cara dalam memodrenisasi dan digitalisasi KPU dalam pemilihan kepala daerah sebagai dampak pandemi pada saat sekarang ini. Hasil penelitian ini sebagai salah satu pelaksana pemilu perlu melakukan modrenisasi apabila terjadi digitalisasi sistem. Pandemi memberikan efek kejut terhadap KPU untuk melakukan modrenisasi salah satunya dengan cara melakukan digitalisasi sistem pemilihan umum.

Penelitian ketiga oleh Aprista Ritsyawati pada tahun 2020 yang

berjudul “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum di Tahun 2020”. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji upaya yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pilkada pada saat pandemi, membahas berbagai hal positif dan negatif jika pemilu tidak dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Hasil penelitian ini menyatakan tetap terselenggaranya pilkada di tengah pandemi memiliki hal positif dan negatif. Positifnya, amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana dan hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi. Kemudian dari sisi negatifnya, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan pilkada bersifat meningkatkan angka golput.

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini pemilihan kepala daerah tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Pemerintah daerah yang memegang kendali dalam menjalankan demokrasi dan menyalurkan berbagai kebijakan dalam menopang kehidupan masyarakat. Kendali yang dilakukan bertujuan agar masyarakat masih dalam pantauan pemerintah dan tidak keluar dari jalurnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah strategi, kendala yang timbul, dan upaya yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Barat dalam pelaksanaan pilkada langsung tahun 2020 pada masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu kondisi atau objek yang diteliti sebagaimana adanya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan KPU Provinsi Sumatera Barat, anggota partai politik, masyarakat, dan anggota KPPS. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, untuk mengkaji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan data yang didapatkan, jika terdapat sebuah perbedaan maka peneliti meninjau kembali data tersebut untuk dibandingkan agar di dapatkan data yang absah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi KPUD Sumbang dalam Melaksanakan Pilkada Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi

Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan sebuah rencana untuk suatu kegiatan yang akan dilakukan. Di dalam suatu strategi ada beberapa rancangan seperti formulasi tujuan dan kumpulan berbagai rencana kegiatan. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Thompson dalam (oliver, 2007) strategi adalah suatu cara untuk mencapai hasil akhir. Hasil tersebut meliputi tujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian strategi pelaksanaan pilkada dimasa pandemi yang dijalankan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat harus

menyesuaikan regulasi yang telah dibuat oleh KPU RI untuk memenuhi tujuan pilkada yaitu terpilihnya pemimpin berkualitas dan berjalannya demokrasi yang harmonis di tengah masyarakat. Pilkada dimasa pandemi ini sangat penting dilakukan, karena pada saat pandemi peran kepala daerah sangat dibutuhkan.

Untuk pelaksanaan pilkada, ada dua strategi yang diungkapkan oleh Newman dalam Adrianus (2006:211-212), yaitu: a) strategi rasionalisasi. Strategi yang memberikan informasi rinci terkait teknis pemilihan dengan menyebar potret yang berisi ajakan untuk memilih disuatu pemilu. Hal ini menjadi suatu transparansi penyediaan informasi bagi publik dan terjaminnya kemudahan dalam mendapatkan informasi. b) Strategi bujukan, Strategi ini mengenalkan atribut pemilihan umum kepada masyarakat guna mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi bujukan dilakukan dengan cara mendekati diri kepada masyarakat dengan segala macam kegiatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam pelaksanaan pilkada dimasa pandemi ada beberapa strategi yang diungkapkan oleh KPU yang meliputi: 1) Mendorong partisipasi masyarakat pada pilkada di tengah pandemi, 2) Memperhatikan aspek kesehatan, 3) Komitmen, 4) Sarana dan Prasarana 5) Modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan Pilkada.

Strategi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu: 1) Mengefektifkan sosialisasi pilkada di masa pandemi, 2) Mengoptimalkan kampanye di media masa, 3) Memastikan seluruh tahapan sudah berdasarkan aspek kesehatan, 4)

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi si rekap dalam penginputan suara.

Kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat

Kendala adalah suatu penghalang yang membuat pencapaian tujuan terhambat. Menurut Forgy (1991) ada dua tipe kendala yaitu kendala fisik dan non fisik. Kendala fisik adalah kendala yang berkaitan dengan kapasitas mesin, sedangkan non fisik berupa permintaan produk serta prosedur kerja. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pilkada, antara lain SDM yang kurang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya yang minim.

Kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Pilkada yaitu, SDM yang kurang (Anggota PPK, PPS, dan KPPS), waktu yang kurang optimal, sumber dana yang kurang memadai, kondisi alam dimana masih banyak daerah black spot di Sumatera Barat, dan masyarakat juga salah satu faktor penghabat dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima sesuatu perubahan yang baru.

Upaya KPUD Sumatera Barat dalam Menanggulangi Kendala Pilkada

Upaya adalah suatu usaha atau tindakan dalam menyelesaikan masalah. Menurut Poerwadarminta (2009) mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, dan tujuan. Hal ini berbarengan dengan yang dikatakan oleh Aprista Ristyawati (2020, :91) dengan tetap dilaksanakannya pilkada ditengah pandemi maka demokrasi dan jaminan kesehatan masyarakat

sama-sama tercapai. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam melaksanakan pilkada dimasa pandemi, yaitu: a) mengoptimalkan komunikasi dengan cara sosialisasi pilkada. b) sumber daya manusia yang mencukupi. c) kedisiplinan masyarakat. d) tetap menjunjung integritas pilkada.

Upaya yang dilakukan KPU untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan pilkada dimasa pandemi yaitu, perekrutan sumber daya manusia yang kurang dengan cara menambah waktu pendaftaran untuk PPK, PPS, dan KPPS, mengoptimalkan sosialisasi pilkada, sosialisasi gencar dilakukan baik secara langsung maupun online. Kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dimasa pandemi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak akan menimbulkan masalah, pemanfaatan sumber dana mengoptimalkan sumber dana dari pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Serta memperhatikan kondisi daerah dan transportasi untuk sosialisasi pilkada hal ini meninjau kembali kendaraan apa yang bisa menjangkau daerah terpencil di Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 menyesuaikan regulasi dengan KPU RI dalam melaksanakan pilkada tahun 2020. Strategi tersebut yaitu: 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, 2) memperhatikan aspek kesehatan, 3) Komitmen, 4) Sarana dan Prasarana, 5)

Modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan Pilkada. Setelah melaksanakan strategi tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki angka partisipasi 61,68% pada Pilkada tahun 2020 lalu. Angka di tahun 2020 ini tinggi dibandingkan pada tahun 2015 lalu.

Dengan demikian ini membuktikan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil walaupun belum mencapai rata-rata Nasional sebesar 77,5. Kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat antara lain: a) SDM yang kurang memadai. b) Kurangnya partisipasi masyarakat. c) minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, dan d) sumber daya yang minim.³ Kemudian upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu: perekrutan sumber daya manusia yang kurang, mengoptimalkan sosialisasi pilkada, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dimasa pandemi, pemanfaatan sumber dana, memperhatikan kondisi daerah dan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. S. 2020. Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol.2 No.1.
- Oliver, Sandra. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Persada, I. S. A. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*

- (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 8 No.2.
- Pipe, A. G., Fogarty, T. C., & Winfield, A. (1991, October). Hybrid adaptive heuristic critic architectures for learning in mazes with continuous search spaces. In *International Conference on Parallel Problem Solving from Nature* (pp. 482-491). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Pito, Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori Teori Politik Dari Sistem Politik Terkonsolidasi*. Jakarta: Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Pontoh, C. (2015). Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(1).
- Ristyawati, A. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Crepido*. Vol. 02 No. 02.
- Spinelli, A. 2020. Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea. *International Institute Democracy and Electoral Assistance*. Issues 2.
- Utomo, W. W. 2020. Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harukah*. Vol.03 No. 01.
- Wasisto, A.& Prayudi. 2020. Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII. No. 12.
- W.J.S.Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka